

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat tentunya membawa pengaruh terhadap pembangunan negara, terlebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan akan kawasan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat. Hal yang sering kali terjadi di perkotaan adalah sulitnya pemenuhan tempat tinggal layak huni karena terbatasnya ruang perkotaan sehingga mudah terciptanya kawasan permukiman kumuh. (Solehati, Irwansyah, Caisarina. 2017) Pesatnya perkembangan permukiman perkotaan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk maupun urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya permukiman kumuh. (Rindarjono, 2013) Terdapat faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang dan faktor lahan perkotaan.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang menghadapi persoalan tentang permukiman kumuh. Melalui Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K411.012/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk dengan jumlah keseluruhan yaitu 131,2 Ha yang tersebar di 18 lokasi. Bendil merupakan lokasi dengan luas Kawasan permukiman kumuh paling besar yaitu 13,8 Ha dan angka permukiman kumuh yang

paling kecil ada di Belko dengan luas Kawasan permukiman kumuh yaitu 0,7 Ha. Kelurahan Banaran merupakan salah satu wilayah yang ada di kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan luas permukiman kumuh sebesar 4,04 Ha.

Kelurahan Banaran merupakan pusat perdagangan barang dan jasa, salah satu asset perdagangan barang dan jasa yang besar yaitu adanya pasar Kertosono. Dilansir dari media online Berita Satu.com (oktober 2017), pada tahun 2017 pasar ini mengalami bencana kebakaran. Kini pasar kertosono lokasinya dipindah ke permukiman dekat dengan kantor Kelurahan Banaran. Tentunya hal ini menimbulkan suatu kepadatan baru, juga dampak langsung pada permukiman dan harus dilakukan suatu penanganan permukiman. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Bu Yusi yang merupakan salah satu pengelola LKM Melati di Kelurahan Banaran menyatakan bahwa:

“Daerah ini merupakan kawasan yang dulunya sering rawan banjir karena drainasenya yang buruk dan juga akses jalan untuk masuk kompleks kawasan permukiman yang tidak tertata. Persoalan pemukiman kumuh di wilayah ini tersebar di beberapa titik permukiman warga yang juga dekat dengan pasar yang memerlukan perhatian untuk penataan permukiman. Selain itu hal menarik di kelurahan banaran yaitu memiliki kampung yang disebut Kampung Jajan, dan juga pusat perdagangan yang juga berada di Kawasan permukiman kumuh”.

Munculah berbagai program untuk menata lingkungan permukiman kumuh salah satunya adalah Program KOTAKU. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membangun system, memfasilitasi

pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Tujuan program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan yang ditargetkan di Indonesia dan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik serta permukiman di beberapa daerah yang terkena dampak bencana. Program KOTAKU mengajak para pihak terlibat aktif dalam penanganan kumuh yang biasa disebut kolaborasi.

Dari observasi peneliti, pada tahun 2020 Kelurahan Banaran telah menerima bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) untuk program KOTAKU senilai 1 M yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan tahapan-tahapan, mulai dari tahap *pertama*, persiapan. *Kedua*, tahap perencanaan. *Ketiga*, tahap pelaksanaan. *Keempat*, tahap keberlanjutan. *Kelima*, kegiatan menerus dan berkala.

Hasil penelitian pendahuluan penulis dengan Pak Asman yang merupakan salah satu konsultan Program KOTAKU pada 14 Oktober 2021 menyatakan bahwa :

Dari Gambaran umum implementasi program KOTAKU di Kelurahan Banaran ialah mulai dari tahap awal, yaitu tahap sosialisasi. Kemudian, melakukan FGD prioritas yaitu menentukan skala prioritas setelah masalah itu muncul. Tahap selanjutnya yaitu MP2K (musyawarah pra kegiatan konstruksi) yaitu dimusyawarkan rencana kegiatan atau gambaran kegiatan ke calon KSM. Setelah tahap ini dana akan turun dan masuk ke LKM lalu diturunkan ke KSM sebagai pelaksana. Setelah gambaran teknis disepakati dan dananya telah tersedia maka masuk ke tahap pelaksanaan dengan terminasi 70%. Pada tahap ini dikarenakan pembelian U-dich melebihi dari patokan harga 1 item yaitu 100 juta/item maka dilakukan lelang.

Lebih lanjut konsultan Program Kotaku menjelaskan beberapa masalah yang terjadi saat tahapan implementasi berlangsung yaitu:

“Salah satu persoalan dalam pengimplementasian program KOTAKU di kelurahan Banaran adalah euforia masyarakat. Sebagian masyarakat belum paham mengenai manfaat teknis program ini, dan LSM yang tidak berkompromi. Sebagai program yang berbasis masyarakat tentu dinamika di lapangan menjadi hal yang wajar”.

Euforia masyarakat dan dinamika pelaksana merupakan beberapa permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di kelurahan Banaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul *“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) “ (Studi Kasus di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Kepmen PUPR No. 167/KPTS/M/2020)*

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk?

### **1.3. Tujuan**

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

### **1.4. Manfaat**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah informasi maupun rujukan referensi, khususnya bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dipertimbangkan oleh pihak pelaksana Program KOTAKU dan pihak pemelihara program di Kelurahan Banaran.